

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Untuk memberikan penjelasan yang memudahkan interpretasi temuan investigasi tambahan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Data dapat dikategorikan dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai salah satu metode. Hal ini bertujuan untuk mengkarakterisasi responden sehingga ciri-ciri responden dapat digunakan untuk memahami responden sebagai sebuah kelompok. Kisaran skor tanggapan responden berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan salah satu variabel deskriptif dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner

No.	Penyebaran Kuesioner	Jumlah	Presentase
1.	Kesioner didistribusikan	32	100
2.	Kembali	32	100
3.	Tidak Kembali	-	-
Total Disebar		32	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, 32 eksemplar kuesioner dibagikan secara total, atau 100%, dan tidak ada yang tidak menjawab. Seluruh pejabat fungsional yang bekerja di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Provinsi Lampung yang terlibat dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diikutsertakan dalam subjek penelitian.

Berikut ini disajikan frekuensi karakteristik berdasarkan demografi responden:

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

4.2.1 Pendidikan

Untuk mengetahui Pendidikan responden, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	Diploma 1 (D1)	4	12,5
2.	Diploma 3 (D3)	6	18,75
3.	Strata 1 (S1) / Diploma 4 (D4)	14	43,75
4.	Strata 2 (Master)	8	25
Total		32	100

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2023

Tabel 4.2 di atas menjelaskan bahwa responden yang menjawab daftar pertanyaan kuesioner memiliki tingkat Pendidikan Diploma 1 (D1) sebanyak 4 responden (12,5%), Diploma 3 (D3) sebanyak 6 responden (18,75%), Strata 1 (S1) / Diploma 4 (D4) sebanyak 14 responden (43,75%), dan Strata 2 (Master) sebanyak 8 responden (25%).

4.2.2 Jabatan

Untuk mengetahui Jabatan responden, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1.	Kasubbag Tata Usaha (TU)	1	3,125
2.	Staf Tata Usaha (TU)	31	96,875
Total		32	100

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa Kasubbag Tata Usaha sebagai responden ada sebanyak 1 responden (3,125%) dan Staf Tata usaha ada sebanyak 4 responden (96,875%). Dapat diartikan bahwa rata-rata pengisi dalam responden ini adalah Staf Tata Usaha.

4.2.3 Masa Bekerja

Untuk mengetahui lamanya responden bekerja pada instansi masing-masing, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Masa Bekerja Responden

No.	Masa Bekerja	Jumlah	Presentase
1.	1-5 Tahun	10	31,25
2.	6-10 Tahun	4	12,50
3.	11-15 Tahun	11	34,375
4.	16-20 Tahun	2	6,25
5.	> 20 Tahun	5	15,625
Total		32	100

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa masa bekerja responden dalam penelitian ini yang termasuk dalam masa bekerja 1 sampai 5 Tahun sebanyak 10 responden (31,25%), masa bekerja 6 sampai 10 tahun sebanyak 4 responden (12,50%), masa bekerja 11 sampai 15 tahun sebanyak 11 responden (34,375%), masa bekerja 16 sampai 20 tahun sebanyak 2 responden (6,25%), dan masa bekerja responden yang lebih dari 20 tahun sebanyak 5 responden (15,625%). Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu dalam masa kerja 1 sampai 5 tahun dan 11 sampai 15 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness*. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 25, diperoleh hasil analisis deskriptif pada table berikut:

Tabel 4. 5 Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKIP_TOTAL	32	39.00	50.00	44.0625	4.18089
KR_TOTAL	32	27.00	35.00	30.8438	3.07025
KSA_TOTAL	32	38.00	50.00	43.3438	4.13958
PI_TOTAL	32	46.00	60.00	53.0312	5.13360
SP_TOTAL	32	22.00	30.00	26.2188	2.80247
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Data Primer yang diolah pada tahun 2023

Tabel 4.5 diatas dapat menjelaskan deskriptif statistik yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi. Untuk variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 39, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 44,0625 dan nilai standar deviasi sebesar 4,18089. Untuk variabel Kepatuhan Regulasi (X1) nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 35, nilai rata-rata sebesar 30,8438 dan nilai standar deviasi sebesar 3,07025. Untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) memiliki nilai minimum sebesar 38, nilai maksimum sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 43,3438 dan nilai standar deviasi sebesar 4,13958. Untuk variabel Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai minimum sebesar 46, nilai maksimum sebesar 60, nilai rata-rata sebesar 53,0312 dan nilai standar deviasi sebesar 5,13360. Untuk variabel Sistem Pelaporan (X4) memiliki nilai minimum 22, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 26,2188 dan nilai standar deviasi sebesar 2,80247.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui validitas suatu kuesioner. Ketika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkap informasi yang akan diukur oleh kuesioner, maka dianggap valid (Ghozali, 2018). Nilai korelasi *product moment* digunakan untuk mengukur validitas. Item pertanyaan dianggap sah jika korelasi *product moment* antara setiap item pertanyaan dengan skor keseluruhan

memberikan nilai lebih dari r_{tabel} , begitu pula sebaliknya jika nilainya lebih rendah dari r_{tabel} , item pertanyaan dianggap tidak valid dalam mengonstruksi variabel. Aplikasi SPSS 25 digunakan untuk pengujian.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Keterangan
AKIP_1	0,812	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_2	0,783	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_3	0,820	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_4	0,741	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_5	0,851	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_6	0,884	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_7	0,884	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_8	0,759	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_9	0,744	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
AKIP_10	0,900	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.6, nilai r_{hitung} lebih tinggi dari r_{tabel} untuk setiap item pernyataan pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasilnya, item pernyataan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) seluruhnya valid.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Kepatuhan Regulasi (X1):

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Regulasi (X1)

Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Keterangan
KR_1	0,838	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KR_2	0,780	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KR_3	0,864	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KR_4	0,770	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KR_5	0,881	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KR_6	0,795	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KR_7	0,843	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} untuk semua item pernyataan pada variabel Kepatuhan Peraturan (X1), sesuai dengan hasil uji validitas pada tabel 4.7. Item variabel Kepatuhan Peraturan (pernyataan X1) semuanya dapat dianggap valid sebagai hasilnya.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2).

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Keterangan
KSA_1	0,727	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_2	0,886	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_3	0,859	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_4	0,854	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_5	0,820	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_6	0,699	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_7	0,836	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_8	0,859	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_9	0,819	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
KSA_10	0,787	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa untuk semua item pernyataan pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) didapatkan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) sudah valid.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Pengendalian Internal (X3).

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal

Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Keterangan
PI_1	0,799	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_2	0,740	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_3	0,899	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_4	0,764	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_5	0,837	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_6	0,899	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_7	0,835	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_8	0,763	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_9	0,850	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_10	0,796	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_11	0,716	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
PI_12	0,764	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa untuk semua item pernyataan pada variabel Pengendalian Internal (X3) didapatkan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Pengendalian Internal (X3) sudah valid.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan pada variabel Sistem Pelaporan (X4).

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pelaporan

Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Kondisi	Keterangan
SP_1	0,850	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
SP_2	0,878	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
SP_3	0,899	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
SP_4	0,856	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
SP_5	0,834	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid
SP_6	0,892	0,3388	$r_{hitung} > r_{tabel}$	Valid

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.10, dapat disimpulkan bahwa untuk semua item pernyataan pada variabel Sistem Pelaporan (X4) didapatkan nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada variabel Sistem Pelaporan (X4) sudah valid.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Konsistensi alat ukur dievaluasi menggunakan uji reliabilitas untuk melihat apakah dapat diandalkan dan menjaga konsistensi selama beberapa kali pengukuran (Hamid et al, 2019). Metode Cronbach's Alpha yang sering digunakan dalam penelitian merupakan salah satu dari beberapa teknik pengujian reliabilitas, antara lain metode tes ulang, rumus Flanagan, Cronbach's Alpha, rumus KR-20, KR-21, dan metode Hoyt's Anova (Hamid et al., 2019). Jika nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 maka data dianggap kredibel (Ghozali, 2018).

Berikut disajikan data hasil uji reliabilitas pada semua variabel penelitian.

Tabel 4. 11 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.977	45

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh yang disajikan pada tabel 4.11, didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* 0,977, dan menurut Ghozali (2018) data dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pernyataan variabel dari penelitian ini bersifat reliabel.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah korelasi antar variabel independen dalam model regresi tinggi atau sempurna. Variabel dalam model regresi yang layak tidak boleh dikorelasikan. Ketika variabel independen memiliki tingkat korelasi yang tinggi, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen terdistorsi (Ghozali, 2018).

Uji multikolinieritas diterapkan ketika terdapat korelasi atau keterkaitan yang sangat signifikan antara dua atau lebih variabel eksogen. sehingga sulit untuk membedakan dampak dari variabel-variabel tersebut (Hamid et al, 2019). Nilai toleransi (TL) kurang dari atau sama dengan 0,1 (VIF 0,1) atau VIF lebih dari atau sama dengan 10 (VIF 10), penerimaan H₀, atau pernyataan bahwa multikolinieritas telah terjadi adalah kondisi pengujian. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinieritas pada kedua jalur tersebut maka akan dilihat nilai VIF pada jalur substruktural 1 dan substruktural 2 (Ghozali, 2018).

Dari hasil pengolahan melalui program SPSS 25, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KR_TOTAL	0,108	9,228
KSA_TOTAL	0,139	7,212
PI_TOTAL	0,119	8,375
SP_TOTAL	0,157	6,350

a. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan hasil tabel 4.12 pada kolom *Collinearity Statistics* yaitu pada kolom VIF, untuk variabel Kepatuhan Regulasi (X1) didapatkan nilai 9,228, Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) didapatkan nilai 7,212, Pengendalian Internal (X3) didapatkan nilai 8,375, dan variabel Sistem Pelaporan (X4) didapatkan nilai 6,350. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini mendapatkan nilai VIF < 10 dan tidak terdapat gangguan multikolinearitas pada model regresi. Dan pada kolom *tolerance* untuk seluruh variabel didapatkan nilai *tolerance* > 0,1. Sehingga seluruh variabel pada kolom *tolerance* dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinearitas pada model regresi.

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas

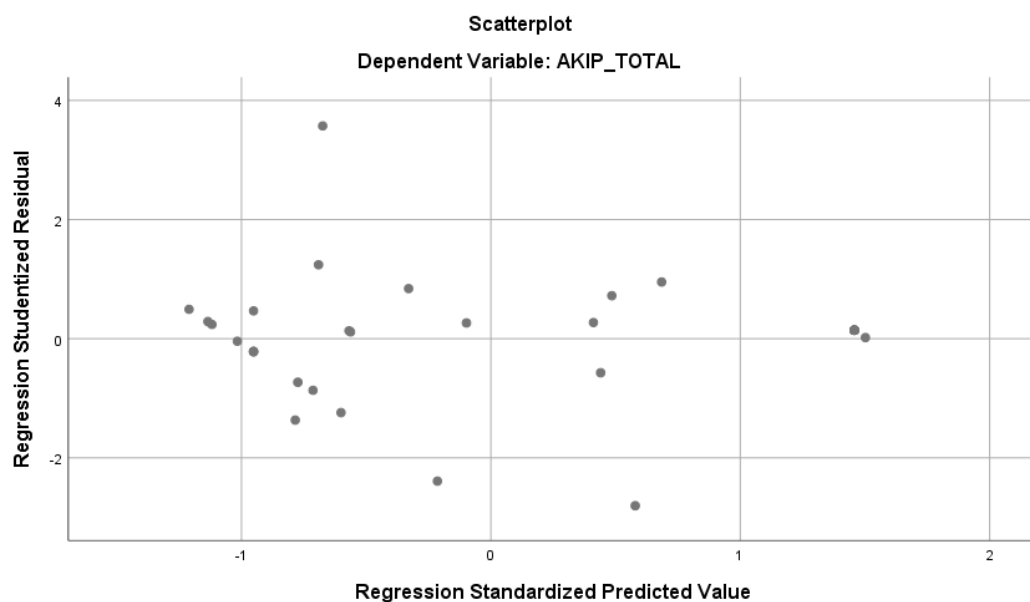
Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variansi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Homoskedastisitas mengacu pada varians yang konsisten dari satu pengamatan residual ke yang berikutnya, sedangkan heteroskedastisitas mengacu pada varians yang bervariasi. Bila residual dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya konstan, homoskedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas, model regresi dianggap baik (Ghozali, 2018). Pola gambar scatterplot model dapat digunakan untuk meramalkan apakah terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan meliputi:

- 1) Heteroskedastisitas terjadi jika ada pola tertentu, seperti titik (titik) yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, lalu menyempit);
- 2) Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik berjarak sama di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25 diperoleh hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan melihat gambar berikut ini:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Dari gambar 4.1 diatas, terlihat bahwa grafik scatterplot sebaran data tampak titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4.5.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (DW) (Ghozali, 2018). Ghozali (2018) menjelaskan bahwa dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (dU) dan (4-dU) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi;
2. Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (dL) maka koefisien autokorelasinya lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi;
3. Bila DW lebih besar dari (4-dU) maka koefisien korelasinya lebih kecil daripada nol, berarti ada korelasi;
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (dU) atau DW terletak antara (4dU) dan (4-dL) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25 diperoleh hasil uji autokorelasi pada penelitian ini pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.941 ^a	.886	.869	1.51044	2.2394

a. Predictors: (Constant), SP_TOTAL, KSA_TOTAL, PI_TOTAL, KR_TOTAL

b. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.13, dapat dilihat bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,2394. Sedangkan nilai dU yang tersedia pada tabel *Durbin Watson* sebesar 1,7323 dan nilai (4-dU) sebesar (4 - 1,7323) yaitu 2,2677. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin-Watson* yang tertera pada tabel 4.12 diatas berada diantara nilai dU dan (4-dU), yaitu 2,2394 berada diantara 1,7206 dan 2,2677. Artinya, dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi.

4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk meneliti keadaan (naik turunnya) variabel terikat, bila variabel bebasnya dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2017).

Sebagai dasar analisis, nilai koefisien regresi sangat menentukan hasil penelitian. Jika koefisien Beta bernilai positif (+) maka dapat diartikan terjadi pengaruh searah antara variabel bebas dengan variabel terikat, setiap kenaikan nilai variabel bebas akan mengakibatkan kenaikan variabel terikat. Sebaliknya, jika koefisien Beta bernilai negative (-) maka dapat diartikan terjadi pengaruh yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Berikut merupakan hasil pengolahan data melalui program SPSS 25 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2.394	2.915		.821	.419		
	KR_TOTAL	.658	.268	.483	2.451	.021	.108	9.228
	KSA_TOTAL	.401	.176	.397	2.281	.031	.139	7.212
	PI_TOTAL	.361	.153	.443	2.358	.026	.119	8.375
	SP_TOTAL	-.578	.244	-.387	-2.368	.025	.157	6.350

a. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diperoleh rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,394 + 0,658X_1 + 0,401X_2 + 0,361X_3 - 0,578X_4$$

Artinya:

a. Konstanta (a)

Nilai konstanta 2,394, menunjukkan bahwa jika tidak ada Kepatuhan Regulasi (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Pengendalian Internal (X3), dan Sistem Pelaporan (X4) maka nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 2,394 persen.

b. Kepatuhan Regulasi (X1) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Nilai koefisien Kepatuhan Regulasi untuk variabel X1 sebesar 0,658. Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan X1 (Kepatuhan Regulasi) maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,658.

c. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Nilai koefisien Kejelasan Sasaran Anggaran untuk variabel X2 sebesar 0,401. Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan X2 (Kejelasan Sasaran Anggaran) maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,401.

d. Pengendalian Internal (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Nilai koefisien Pengendalian Internal untuk variabel X3 sebesar 0,361. Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan X3 (Pengendalian Internal) maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,361.

e. Sistem Pelaporan (X4) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Nilai koefisien Sistem elaporan untuk variabel X4 sebesar -0,578. Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan X4 (Sistem Pelaporan) maka akan mengurangi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,074.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis

4.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berguna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel-variabel independent memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun bila satu variabel independent ditambahkan ke dalam model regresi. Jika dalam uji empiris terdapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol (Ghozali, 2018).

Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25 yang disajikan pada tabel 4.15

Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R square)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.941 ^a	.886	.869	1.51044	2.2394

a. Predictors: (Constant), SP_TOTAL, KSA_TOTAL, PI_TOTAL, KR_TOTAL

b. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Dari tabel 4.15 diatas, didapatkan hasil bahwa pengolahan data menunjukkan besarnya *adjusted* R^2 adalah 0,869. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model regresi hanya mampu menjelaskan Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem pelaporan berpengaruh sebesar 86,9% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan 13,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang diteliti.

4.7.2 Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya model penelitian layak digunakan dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ artinya model penelitian tidak layak digunakan.

Berikut disajikan data hasil analisis untuk uji F dengan SPSS 25:

Tabel 4. 16 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	480.276	4	120.069	52.629	.000 ^b
	Residual	61.599	27	2.281		
	Total	541.875	31			

a. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

b. Predictors: (Constant), SP_TOTAL, KSA_TOTAL, PI_TOTAL, KR_TOTAL

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, pengujian anova dipakai untuk menggambarkan tingkat pengaruh antara variabel bebas Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara Bersama-sama. Dapat disimpulkan bahwa pada tabel nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti model dalam penelitian ini layak digunakan dan variabel Kepatuhan Regulasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan secara Bersama-sama mampu mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perindustrian unit Satuan Kerja di Provinsi Lampung.

4.7.3 Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independent yang lain konstan. Pengujian ini didasarkan pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018).

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen;
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka secara parsial variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen;
- 3) Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen;
- 4) Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 25 didapatkan data berikut:

Tabel 4. 17 Hasil Uji t

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients					
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	2.394	2.915		.821	.419			
	KR_TOTAL	.658	.268	.483	2.451	.021	.108	9.228	
	KSA_TOTAL	.401	.176	.397	2.281	.031	.139	7.212	
	PI_TOTAL	.361	.153	.443	2.358	.026	.119	8.375	
	SP_TOTAL	-.578	.244	-.387	-2.368	.025	.157	6.350	

a. Dependent Variable: AKIP_TOTAL

Sumber: Data primer yang diolah pada tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, maka dapat dijabarkan dalam pembahasan sebagai berikut:

4.7.3.1 Pengaruh Kepatuhan Regulasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh Kepatuhan Regulasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari penjelesan Ghozali (2018), untuk

menentukan dasar penerimaan atau penolakan hipotesis salah satunya adalah melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari ($<$) nilai signifikansi yang telah diatur, maka H1 diterima. Artinya, pada penelitian ini variabel Kepatuhan Regulasi (X1) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahid (2016) dan Irawati & Agesta (2019) yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Solihin (2007) yang mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai seperti penerapan *reward system* dan *punishment* secara konsisten dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Artinya, ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program sehingga tercapainya sasaran atau tujuan yang dikehendaki yang akan mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia unit satuan kerja yang berada di Provinsi Lampung. Peraturan perundangan diciptakan untuk menjaga agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, karena itu perlu dilakukan pengawasan guna memastikan ketaatan terhadap peraturan yang telah dibuat betul-betul dilaksanakan, dan dilakukan tindakan tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini berlaku bahwa semakin tinggi ketaatan pada peraturan perundangan maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang dihasilkannya.

4.7.3.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis kedua menunjukkan adanya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berarti hipotesis kedua diterima. Menurut Ghozali (2018), salah satu cara untuk memutuskan menerima

atau menolak suatu hipotesis adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari ambang batas signifikansi 0,05, maka H2 diterima. Secara khusus variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) dalam penelitian ini berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Menurut Kenis (1979), sejauh mana tujuan anggaran dinyatakan secara eksplisit dan rinci dengan maksud agar anggaran dapat dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran tersebut merupakan ukuran kejelasan anggaran. Oleh karena itu, tinjauan kinerja pemerintah akan semakin akurat jika maksud dan tujuan anggaran semakin jelas dilakukan dan dicapai.

Pada Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Provinsi Lampung dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat juga disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian unit Satuan Kerja di Provinsi Lampung akan meningkat seiring dengan kenaikan tingkat kejelasan sasaran anggaran yang ditetapkan. Menurut penelitian Aprilianti dan Kurniawan (2020), Allorante (2021), dan Budiastawa et al. (2021), terdapat hubungan antara variabel kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.7.3.3 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berarti hipotesis ketiga diterima. Menurut Ghozali (2018), salah satu cara untuk memutuskan menerima atau menolak suatu hipotesis adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari ambang batas signifikansi 0,05, maka H3 diterima. Artinya, variabel Pengendalian (X3) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Sesuai dengan pendekatan teori kontijensi mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengatur sebuah organisasi adalah bagaimanapun bergantung pada salah satu

situasi yaitu situasi internal. Hal ini berarti, pengendalian internal dinilai mampu untuk mengatur kegiatan organisasi serta dapat memantau jalannya kegiatan di organisasi. Pengendalian internal sangat penting dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat dengan semakin baiknya pengendalian internal. Lebih mudah bagi pejabat pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ketika pengendalian internal diatur dan dikelola secara transparan sesuai dengan prinsip akuntansi dan tata kelola yang baik (Budiastawa et al, 2021). Menurut penelitian Aprilianti et al (2020), Allorante (2021), serta Harianto dan Zarefar (2021), terdapat hubungan antara faktor pengendalian internal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.7.3.4 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima karena menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan Ghozali (2018), salah satu cara untuk memutuskan menerima atau menolak suatu hipotesis adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi kurang dari ambang batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi pada variabel X4 yaitu 0,025 artinya kurang dari ($<$) 0,05 dan H4 diterima. Artinya, variabel Pengendalian (X4) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Temuan penelitian ini kemungkinan besar merupakan hasil dari ketidakmampuan Kementerian Perindustrian Provinsi Lampung untuk sepenuhnya memanfaatkan mekanisme pelaporan yang ada untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan terwujud dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang menggabungkan sistem akuntansi keuangan dan sistem pelaporan.